



Pemerintah
Kabupaten Mempawah



Renstra

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN MEMPAWAH

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang



optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Mempawah, Juli 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Kabupaten Mempawah

Drs. Rohmat Effendy, MM
NIP. 19660515 199302 1 003
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	30
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	33
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.2.2 Isu Strategis	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	55
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	55
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	107
BAB V PENUTUP	111
5.1 Kesimpulan	111
5.2 Kaidah Pelaksanaan	112
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	113



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah	24
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah	28
Tabel 2.4	Kelompok Sasaran Layanan	31
Tabel 2.5	Mitra Perangkat Daerah	33
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	34
Tabel 2.7	Perumusan Isu Perangkat Daerah	40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	46
Tabel 3.2	Penentuan Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	50
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	52
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	53
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	56
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	69
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	108
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	21
Gambar 3.2	Pohon Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025;
27. Ditambahkan peraturan tentang Perangkat Daerah terkait dengan urusan, SOTK, serta peraturan-peraturan teknis lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah masing-masing.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;

2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 sebagai berikut :

- a. Penetapan program kerja di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat

- dan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - j. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memiliki tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan di

bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta perencanaan dan keuangan;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta perencanaan keuangan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas; Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan (terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memiliki tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tataaksana, perlengkapan, dan rumah tangga dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Aparatur menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dibidang umum dan aparatur;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan tatausaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan, pengumpulan, penyajian dan pengolahan data, kehumasan serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi dibidang umum dan aparatur;
- h. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang umum dan aparatur;
- i. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP),dan pelayanan publik dilingkungan Dinas;

- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang umum dan aparatur;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang umum dan aparatur;
- l. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup memiliki tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Perencanaan dan Keuangan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
- c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- i. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial

Bidang Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Sosial, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Sosial;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sosial;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Sosial;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Sosial sesuai ketentuan peranturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- f. Pelaksanaan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- g. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- h. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- i. Pelaksanaan penanganan bencana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
- k. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang sosial;
- m. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

- fungsi di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sosial;
 - o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial;
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- f. Pelaksanaan perlindungan perempuan;
- g. Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
- h. Pelaksanaan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- i. Pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- j. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di

- bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

- fungsi di Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang undangan.

2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemerintahan Desa

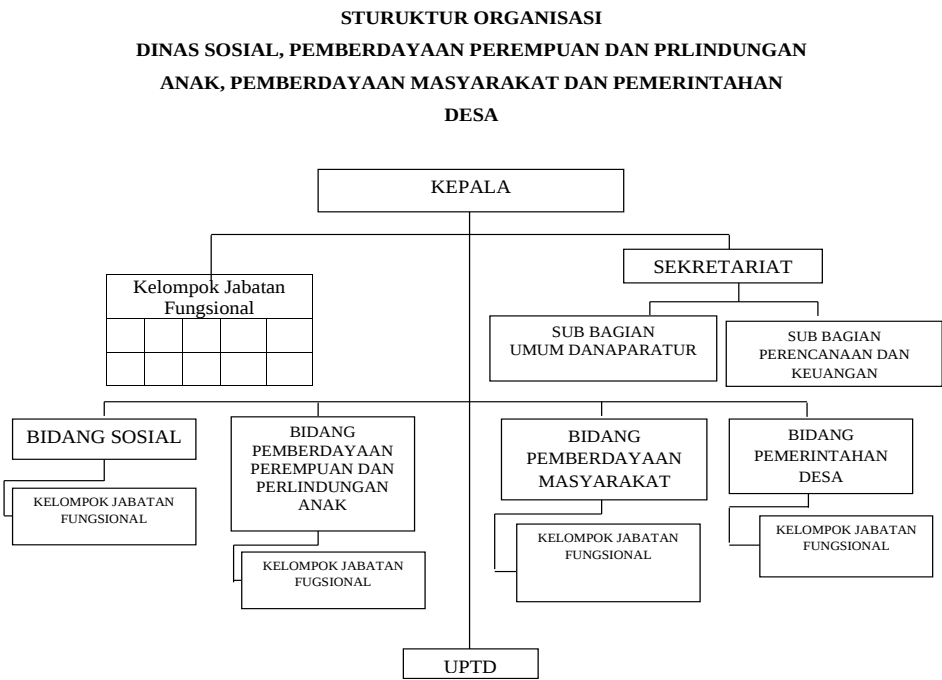
Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Pemerintahan Desa;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Bidang Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan desa;
- f. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kerjasama desa;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- h. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bidang Pemerintahan Desa;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di Bidang Pemerintahan Desa;
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemerintahan Desa;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemerintahan Desa;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemerintahan Desa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah disajikan pada bagan berikut :



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai

regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memiliki 37 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 4 Orang
3. Eselon IV : 8 Orang
4. Pejabat fungsional : 24 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi belum ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebanyak 37 orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 5 Orang
2. Sarjana S-1 : 16 Orang
3. Diploma 3 : 4 Orang
4. SMA Sederajat : 7 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang **S1** yang mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah 37 dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 6 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 10 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 6 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 15 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia ≥ 50 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai dan menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantinya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Tanah	1		
2	Bangunan		1	
3	Meja		17	
4	Mini Bus		1	
5	Kursi Rapat		19	
6	Lemari		7	
7	Kursi Kerja		2	
8	Ac Split		5	
9	Filing Cabinet		2	
10	Kipas Angin		5	
11	Printer		20	
12	Pc Unit		6	
13	Motor		5	
14	Tenda		19	
15	Rice Warmer		17	
16	Kompor Gas		3	
17	Kuali	3		
18	Jaringan Pln	1		
19	Kompor Kompresor		5	
20	Panci Besar		3	

Sumber: Dinsos,PPPAPMPD Kab. Mempawah

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **Dinas Sosial,**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi **tidak layak guna**, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, **serta** pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKU															
1	Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			20%			18%	18%	16,1%					81%		
2	Persentase anak terlantar yang dapat ditangani			20%			23%	%	17,5%					88%		
3	Persentase keluarga miskin yang mendapat pelatihan keterampilan			10%			8%	7,9%	7,9%					79,1%		
4	Persentase pelatihan terhadap PMKS			10%			8%	8,3%	8 %					76,1%		
5	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial				70%	70%				62,5%	62,52%				89,4%	89,4%
6	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Cakupan Pelayanan Kesejahteraan Sosial				70%	70%				60,36%	66,28%				78,65%	94,67 %
7	Persentase Pemenuhan indikator penilaian Kabupaten Layak Anak			75%					NA							
8	Persentase Penyelesaian indikator penilaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani			50 %			73,3%	73,33%	50%					100 %		
9	Persentase Tindak lanjut Permasalahan Perempuan				100%					100%					100%	
10	Persentase Korban Kekerasan pada anak yang mendapatkan layanan sesuai standar				100%					100%					100%	

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang dibina			60 desa			0 desa	60 desa	0 desa					0%		
12	Persentase Desa Mandiri			45%			0%	0%	26,66%					55,55%		
13	Persentase Bumdes dan Bumdesma Yang Aktif dan Maju				29%						0%				0%	
14	Persentase desa yang meningkat statusnya				60%					60%					60%	
15	Persentase Desa tertib Administrasi Pemerintah			45%			45%	45%	45%					100%		
16	Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa				60%					60%					100%	

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

Dinas Sosial Kabupaten Mempawah memiliki indikator kinerja utama (IKU) terdiri dari :

1. Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Persentase anak terlantar yang dapat ditangani
3. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelatihan keterampilan
4. Persentase pelatihan terhadap PMKS
5. Persentase PSKS yang Mendapatkan Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial
6. Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Cakupan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
7. Persentase Pemenuhan indikator penilaian Kabupaten Layak Anak
8. Persentase Penyelesaian indikator penilaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani
9. Persentase Tindak lanjut Permasalahan Perempuan
10. Persentase Korban Kekerasan pada anak yang mendapatkan layanan sesuai standar
11. Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang dibina
12. Persentase Desa Mandiri
13. Persentase Bumdes dan Bumdesma Yang Aktif dan Maju
14. Persentase desa yang meningkat statusnya
15. Persentase Desa tertib Administrasi Pemerintah
16. Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa

Dari tabel diatas dapat dilihat Realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja utama beberapa tahun ada yang tidak sama dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU).



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Tidak Langsung	3.552.805.221	-	-	-	-	3.155.825.424	-	-	-	-	88,83	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	281.298.600	-	-	-	-	264.537.716	-	-	-	-	94,04	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	124.890.000	-	-	-	-	124.631.000	-	-	-	-	99,79	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29.612.000	-	-	-	-	25.014.000	-	-	-	-	84,47	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.650.000	-	-	-	-	8.650.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49.964.100	-	-	-	-	46.232.700	-	-	-	-	92,53	-	-	-	-
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	19.998.600	-	-	-	-	19.911.000	-	-	-	-	99,56	-	-	-	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.476.800	-	-	-	-	7.475.200	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	38.102.400	-	-	-	-	38.102.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.368.720.700	-	-	-	-	1.366.904.500	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	54.800.000	-	-	-	-	54.796.900	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.030.995.532	-	-	-	-	2.027.485.000	-	-	-	-	99,83	-	-	-	-
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	35.939.300	-	-	-	-	35.938.800	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	185.815.450	-	-	-	-	184.691.550	-	-	-	-	99,40	-	-	-	-
Program Pembinaan Anak Terlantar	69.771.925	-	-	-	-	66.121.925	-	-	-	-	94,77	-	-	-	-
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125.246.500	-	-	-	-	124.705.540	-	-	-	-	99,57	-	-	-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	67.186.600	-	-	-	-	67.124.500	-	-	-	-	99,91	-	-	-	-
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	649.005.537	-	-	-	-	637.277.980	-	-	-	-	98,19	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	168.534.900	-	-	-	-	164.408.000	-	-	-	-	97,55	-	-	-	-
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	14.454.000	-	-	-	-	11.054.000	-	-	-	-	76,48	-	-	-	-
Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa	360.000.000	-	-	-	-	29.484.520	-	-	-	-	8,19	-	-	-	-



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	13.209.300	-	-	-	-	9.209.300	-	-	-	-	69,72	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	126.792.800	-	-	-	-	126.792.800	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
Program Penataan Wilayah Administrasi Desa	69.769.900	-	-	-	-	67.798.940	-	-	-	-	97,18	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	4.228.965.512	4.480.001.391	4.446.980.645	4.203.914.365	-	4.099.967.814	4.230.279.592	4.168.072.926	4.116.731.612	-	96,95	94,43	93,734	97,93
Program Pemberdayaan Sosial	-	298.704.840	267.195.139	329.522.951	690.297.909	-	290.816.425	260.910.444	270.011.236	619.065.621	-	97,36	97,65	81,94	89,68
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	10.500.000	15.000.000	-	-	-	6.204.300	3.761.750	-	-	-	59,09	25,08
Program Rehabilitasi Sosial	-	611.155.725	662.938.532	1.055.242.379	837.957.618	-	609.519.685	650.191.314	988.200.929	780.848.872	-	99,73	98,08	93,65	93,18
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	96.571.925	1.188.606.948	2.309.525.000	295.492.961	-	96.425.025	1.181.766.648	2.309.217.400	258.872.050	-	99,85	99,42	99,99	87,61
Program Penanganan Bencana	-	54.667.300	38.999.900	36.499.975	301.074.250	-	54.346.950	38.964.600	34.817.200	290.728.000	-	99,41	99,91	95,39	96,56
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	20.351.000	17.219.949	38.075.025	74.432.174	-	20.350.000	17.219.774	36.589.324	67.437.490	-	100,00	100,00	96,10	90,60
Program Pengarusutamaan Gender	-	-	191.883.150	130.203.500	69.527.500	-	-	191.883.150	124.047.358	53.226.302	-	-	100,00	95,27	76,55
Program Perlindungan Perempuan	-	157.173.700	102.811.375	18.009.350	46.729.550	-	82.891.475	97.854.500	17.384.000	44.498.017	-	52,74	95,18	96,53	95,22
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	533.745.500	553.165.900	528.033.804	114.049.500	-	533.745.275	553.165.750	494.817.406	112.599.400	-	100,00	100,00	93,71	98,73
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	130.990.375	287.974.635	163.331.435	425.563.160	-	130.639.950	285.577.800	157.182.890	412.714.550	-	99,73	99,17	96,24	96,98
Program Perlindungan Khusus Anak	-	266.133.600	274.683.559	182.801.921	137.792.874	-	141.180.575	240.928.334	178.356.330	133.060.048	-	53,05	87,71	97,57	96,57
Program Penataan Desa	-	878.918.083	868.999.023	870.791.872	955.791.872	-	739.628.162	796.313.764	835.215.080	939.228.184	-	84,15	91,64	95,91	98,27
Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	667.801.405	527.485.123	477.552.825	479.257.957	-	567.353.913	493.616.255	367.260.428	362.456.835	-	84,96	93,58	76,00	75,63
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	169.979.215	466.905.975	3.186.014.650	2.553.608.891	-	151.199.375	435.175.254	3.068.006.813	2.553.608.891	-	100	93,20	96,30	99,37
TOTAL	9.453.040.165	8.155.158.180	9.928.870.599	13.783.085.332	11.200.490.581	8.664.175.295	7.518.064.624	9.473.792.923	13.055.383.620	10.732.799.208	91,65	92,64	99,06	94,74	95,82

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

Rasio realisasi anggaran pada tahun 2020 hingga 2024 berada di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah diupayakan secara maksimal dengan rasio tertinggi pada tahun 2022 yakni 99,06%. Faktor yang mendukung tingginya capaian rasio realisasi anggaran meliputi perencanaan anggaran yang terinci dan jelas dengan penggunaan sistem aplikasi SIPD RI dan mempertimbangkan resiko dan kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan melalui Manajemen Resiko Internal (MRI), pelaksanaan anggaran yang melibatkan tim kerja secara berjenjang dan proses pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran serta upaya perbaikan atau alternatif solusi yang dilakukan terhadap kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan anggaran.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sosial	- Penanganan Maslaah Sosial - Bantuan Sosial - Rehabilitasi Sosial - Pemberdayaan Sosial - Perlindungan Sosial - Layanan Lainnya (Pencatatan dan Pendataan Permasalahn Sosial) - Rekomendasi Perijinan	- PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) - Keluarga miskin dan PPKS - Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas - Kelompok Rentan - Anak, Lansia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana - PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) - Berbagai Kegiatan Sosial Seperti : Ijin Operasional LKS, Sumbangan
	Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Fasilitasi Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. - Fasilitasi Forum Anak Daerah - Pendampingan Penyusunan PUG dan PPRG	- Perempuan dan Anak - Forum Anak - Perangkat Daerah
	Pemberdayaan Masyarakat	- Penataan LKD dan LAD - Pembinaan dan Fasilitasi LKD, LAD - Pembinaan BUMdes dan BUMDesma - Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) - Fasilitasi Posyantek - Fasilitasi Indeks desa, SDGS - Pembinaan KOPdes Merah Putih	- Pemerintahan Desa, LKD , Masyarakat - Pemerintahan Desa, LKD , Masyarakat - BUMdes , BUMdesma dan Masyarakat - Masyarakat - Masyarakat - Desa - Koperasi
	Pemerintahan Desa	- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas desa - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa - Fasilitasi sarana dan prasarana pemerintahan desa - Fasilitasi pengelolaan aset desa - Fasilitasi Pelaksanaan musyawarah desa - Fasilitasi Penggabungan, Pengahusan, pembentukan dan perubahan status desa - Fasilitasi Penyusunan Prodeskel - Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	- Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.⁹⁶

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BPJS Kesehatan	Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitas Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	Rumah Sakit Jiwa Prov Kalbar	Fasilitas Penampungan Bagi ODGJ yang Terlantar di Kabupaten Mempawah	Terlaksananya layanan Fasilitas Untuk ODGJ Terlantar
3	BPJS Kesehatan	Fasilitas Layanan kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Kategori Tidak Mampu	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Mempawah

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam

sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan public.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut :

Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah PMKS yang masih banyak dan belum dapat ditangani secara optimal	Jumlah PSKS dan anggaran serta sarana prasarana tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PMKS/PPKS	Kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi PSKS yang mandiri Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam merehabilitasi PMKS/PPKS
		Belum seluruh PMKS/PPKS masuk ke dalam DTKS	Operator data TKSK,PKH dan Fasilitator msih perlu ditingkatkan kemampuan, dan sarana prasaranannya Optimalisasi peran PSKS
		Jumlah PMKS tertinggi adalah fakir miskin, lanjut usia dan disabilitas	Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian
			Belum maksimalnya pemberdayaan kewirausahaan bagi fakir miskin
			Pemberdayaan lanjut usia produktif belum optimal
		Kebijakan terkait bantuan dan pengentasan PMKS/PPKS masih belum maksimal, terutama terkait tanggung jawab pengentasan PMKS/PPKS dan koordinasi sinergitas antar OPD maupun PSKS	OPD belum terintegrasi dalam penanganan PMKS/PPKS, Pengentasan PMKS/PPKS sangat tergantung dari kinerja beberapa OPD
			Jumlah sebaran PSKS yang masih belum dapat menjangkau PMKS/PPKS
2	Rendahnya kualitas hidup dan perlindugn perempuan	Rendahnya produktivitas kelompok ekonomi perempuan	Masih sulitnya kemudahan berusaha bagi perempuan



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya kualitas pendidikan perempuan	Rendahnya tingkat pendidikan perempuan
			Kurangnya Akses dan partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional
		Belum optimalnya implementasi perlindungan perempuan	Kurangnya SDM penyedia layanan korban kekerasan perempuan yang terlatih perlindungan perempuan korban kekerasan
			Rendahnya kesadaran masyarakat terkait deteksi dini kekerasan terhadap perempuan
			Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas layanan kekerasan perempuan yang sesuai standar
3	Rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak	Status Kota Layak Anak (KLA) belum optimal	Kurangnya SDM terlatih KHA
			Rendahnya kualitas layanan kesejahteraan sosial anak
			Kurangnya akses bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
			Kurangnya sarana dan prasarana pendukung hak anak
4	Minimnya ketersediaan data terpilah	Rendahnya penggunaan data terpilah	Belum adanya Sistem data gender dan anak
			Pemahaman data terpilah yang masih kurang
5	Belum Optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kurangnya Pemahaman Aparatur Desa	- Belum optimalnya pembinaan terhadap pemerintahan desa - Belum Optimalnya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa - rendahnya penguasaan Teknologi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Keterbatasan SDM pada Desa
		Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas	- Lambatnya progres penyelesaian Batas Desa - Terhambatnya proses penatausahaan/penginputan pada Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES dikarenakan gangguan pada server - Belum optimalnya pelaksanaan tugas dikarenakan sarana dan prasarana yang terbatas

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Belum tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa	– Belum optimalnya pembinaan terhadap pemerintahan desa – Belum Optimalnya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa – Banyaknya Regulasi yang mengatur tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa – Ketidakpatuhan Penyelenggara Pemerintahan Desa pada regulasi yang ada

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurunkan kerentanan sosial terhadap anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan serta korban bencana alam sosial.
2. Belum optimalnya fasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Belum Optimalnya Pembinaan LKD, LAD, Masyarakat Hukum Adat dan Usaha Ekomi Masyarkat.
4. Kurang tertibnya penyelesaian dokumen administrasi yang dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM.

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan Ekstream dan ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi masalah serius global.
2. Kerentanan Sosial mencakup berbagai kelo mpok yang rentan terhadap dampak negatif seperti anak- anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.
3. Perubhan iklim dapat berdampak signifikan pada kerugian ekonomi, dan meningkatnya kerentanan sosial.
4. Partsipasi institusi dalam melestarikan budaya lokal, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
5. Kesenjangan pembangunan desa dan kota.
6. Urbanisasi

2.2.2.2 Isu Nasional

Isu nasional adalah masalah atau topik penting yang melibatkan kepentingan publik dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat serta menjadi perhatian di tingkat negara. Isu nasional yang relevan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Penanganan PPKS tidak sesuai dengan kondisi nyata dilapangan.

2. Bantuan untuk kesejahteraan sosial tidak memadai sesuai dengan data dilapangan.
3. Meningkatnya Potensi Bencana alam dan sosial.
4. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan.
5. Pemberdayaan Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan.
6. Perlunya Penguatan peran dan fungsi LKD dalam pembangunan desa.
7. Kurangnya pemahaman tentang LKD, terbatasnya sumber daya manusia serta tantangan koordinasi dan partisipasi masyarakat.

2.2.2.3 Isu Regional

Isu regional dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merujuk pada tantangan dan prioritas yang dihadapi di level provinsi. Isu nasional yang relevan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Penanganan PPKS tidak memenuhi kebutuhan dilapangan.
2. Keberdayaan PMKS seperti anak jalanan, gelandangan, lansia dan pengemis memerlukan perhatian khusus dalam bentuk program rehabilitas sosial dan pemberdayaan.
3. masalah lingkungan seperti banjir kebakaran hutan dampak negatif pada penurunan kesejahteraan sosial Masyarakat.
4. Sebagian besar LKD tidak menyampaikan laporan.
5. Belum semua Kabupaten/Kota membuat regulasi LKD.
6. Belum optimalnya penerap aplikasi SIKADES.

2.2.2.4 Potensi Daerah (jika ada/sesuai)

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Pelaksanaan Peningkatan kapasitas potensi sistem sumber kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
2. Peningkatan kualitas perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Mempawah yang berkeadilan gender serta menjadi Kabupaten yang layak anak.
3. Pelaksanaan peran institusi yang ada di desa (LKD, LAD, Lembaga Ekonomi Desa) secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa dan secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.
4. Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangan bencana yang dibiayai APBDes yang bersumber dari dana desa (pemerintah pusat), alokasi dana desa (pemerintah daerah), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi/kabupaten, PADes dan pendapatan lain-lain. Penggunaan APBDes tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi desa.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Mempawah dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penanganan PPKS dan Peningkatan Kapasitas PSKS	Perencanaan Program Kesejahteraan Sosial masih belum menjadi prioritas dalam penentuan anggaran dan belanja daerah.	1. Pemneuhan Anggaran SPM belum memadai 2. Perlindungan Sosial Masyarakat masih belum menjadi prioritas daerah karea masih bergantung pada pemerintahan pusat 3. Kurangnya Pemberdayaan Sosial untuk peningkatan kapasitas PSKS dan PPKS 4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanganan pelayanan kesejahteraan sosial	1. Kemiskinan Ekstream dan ketidaksetraan ekonomi masih menjadi masalah serius global 2. Kerentanan Sosial mencakup berbgai kelo mpok yang rentan terhadap dampak negatif seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. 3. Perubhan iklim dapat	1. Penanganan PPKS tidak sesuai dengan kondisi nyata dilapangan 2. Bantuan untuk kesejahteraan sosial tidak memadai sesuai dengan data dilapangan 3. Meningkatnya Potensi Bencana alam dan sosial.	1. Penanganan PPKS tidak memenuhi kebutuhan dilapangan. 2. Keberdayaan PMKS seperti anaka jalanan, gelandangan, lansia dan pengemis memerlukan perhatian khusus dalam bentuk program rehabilitas sosial dan pemberdayaan 3. masalah lingkungan seperti banjir kebakaran hutan dampak negatif pada penurunan	

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			berdampak signifikan pada kerugian ekonomi, dan meningkatnya kerentanan sosial		kesejahteraan sosial masyarakat	
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanaman korban kekerasan perempuan dan anak	4. Meningkatnya Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 3. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		1. Pernikahan anak dan stunting 2. kurangnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Belum tertibnya Administrasi LKD	1. Belum semua LKD berfungsi sesuai dengan ketentuan 2. Belum semua LKD menyampaikan laporan tahunan	1. Partisipasi institusi dalam melestarikan budaya lokal, dan mengelola sumber daya		1. Sebagian besar LKD tidak menyampaikan laporan 2. 2. Belum semua Kabupaten/Kota	

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			alam secara berkelanjutan		membuat regulasi LKD	
Pembinaan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam Menunjang pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa	1. lambatnya Penyelesaian dokumen APBDes 2. lambatnya penyelesaian dokumen desa(LPJ, Laporan Kinerja) 3. rendahnya pemahaman (kapabilitas) dalam melaksanakan tupoksi masing-masing jabatan	1. Kesenjangan pembangunan desa dan kota 2. Urbanisasi		1. Belum optimalnya penerap aplikasi SIKADES	

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah penurunan keluarga miskin atau tidak mampu
2. Menurunnya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Melaksanakan Pemberdayaan sosial untuk meningkatkan
4. Kapasitas PSKS(Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
5. Meningkatnya bantuan perlindungan dan jaminan sosial
6. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat
7. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan
8. Perlu penyusunan regulasi LKD,LAD, Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku
9. Perlunya Peningkatan SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya
10. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa
11. Kurangnya Sarana dan Prasarana Server aplikasi
12. SISKEUDES dan SIPADES
13. Kurangnya Kemampuan SDM Aparatur Pemerintahan Desa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan

indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia.

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah.

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-2 dan ke-4 tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :



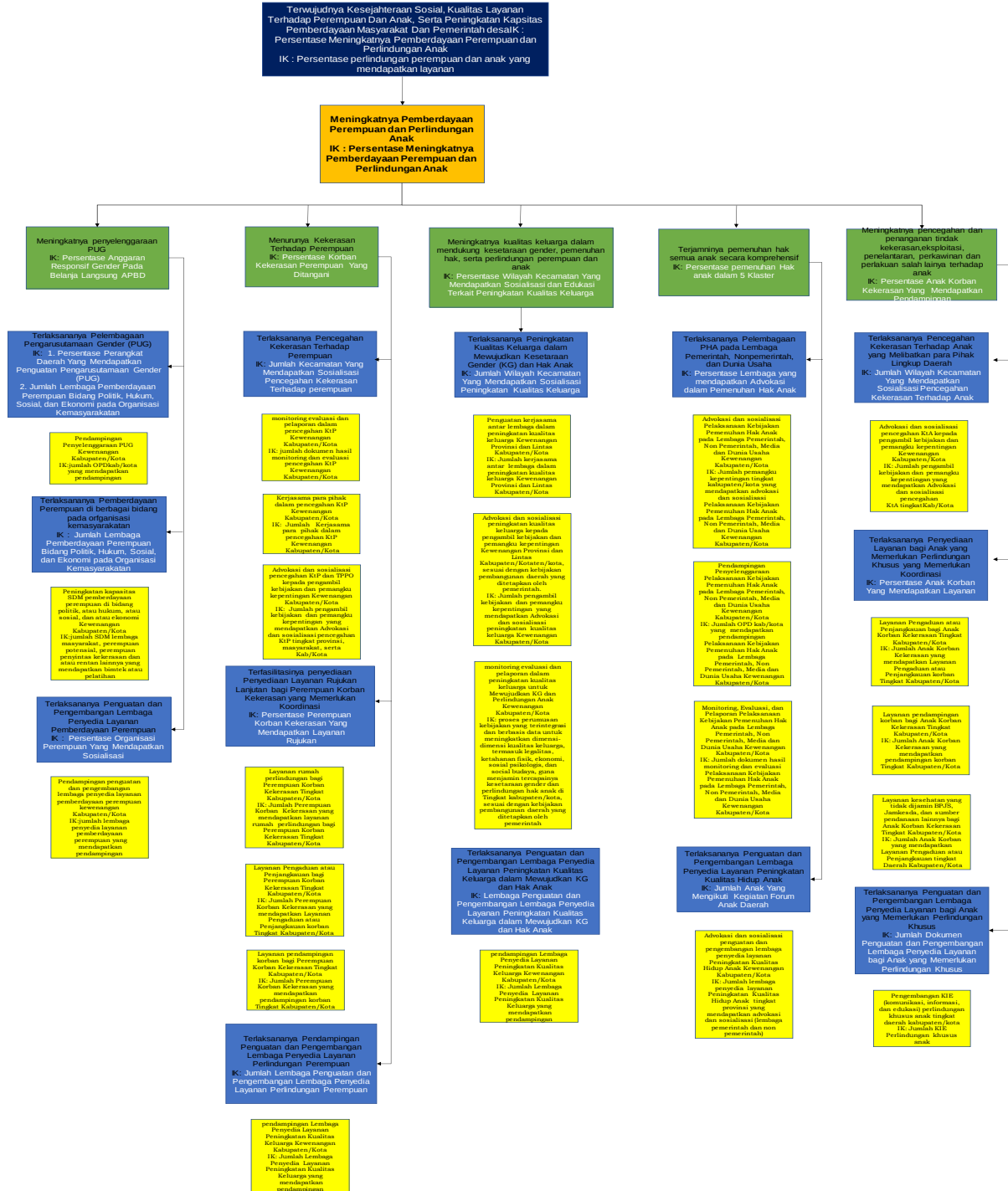
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah

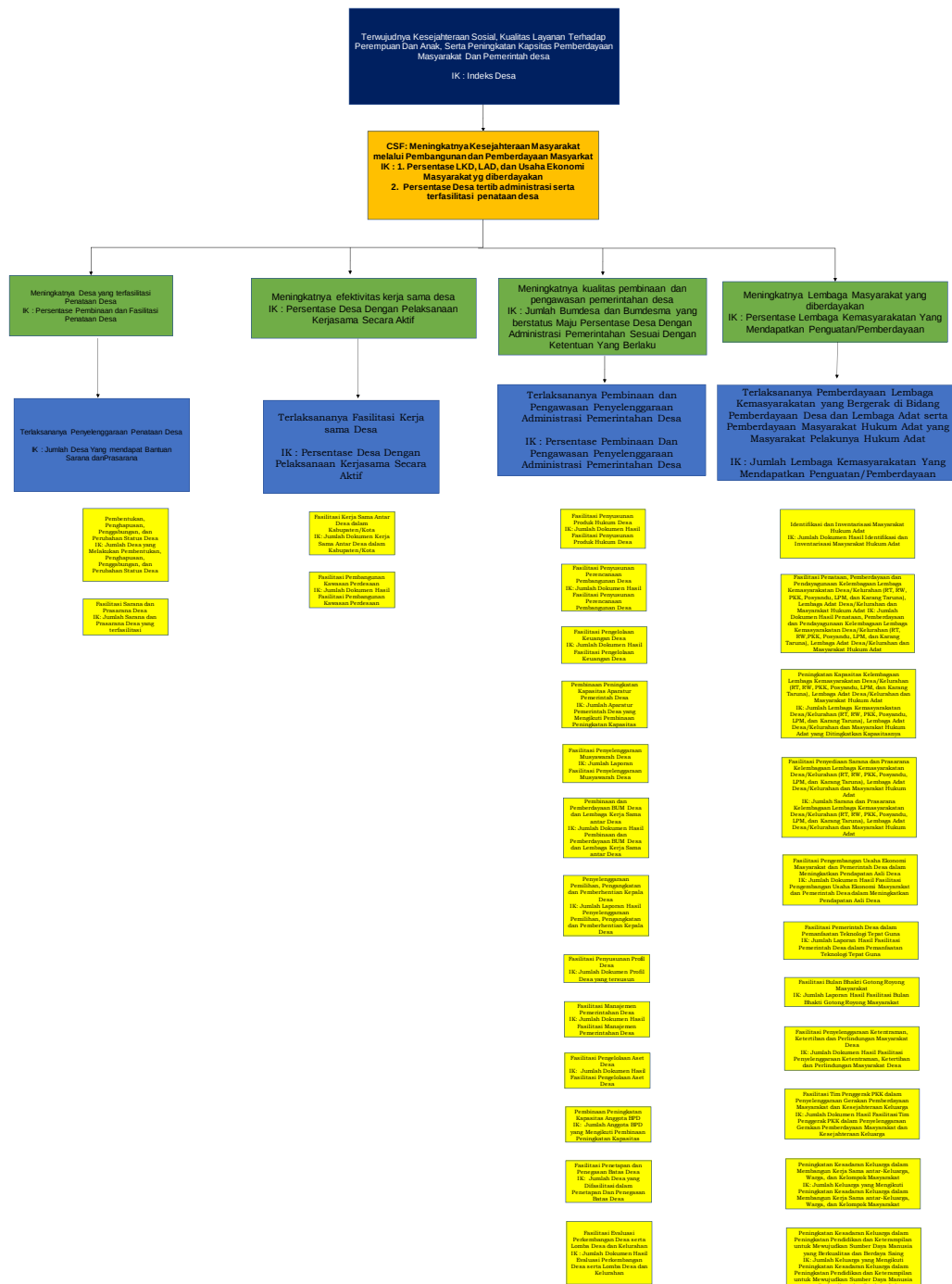
NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	BASEL INE 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan kesetaraan gender	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Kualitas Layanan Terhadap Perempuan Dan Anak, Serta Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah desa		1. Indeks Kesejahteraan Sosial		55	57	59	61	63	65	
			2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)		60,94	61,387	61,834	62,281	62,728	63,175	
Menurunnya kemiskinan daerah			3. Indeks Desa		88	92	95	96	100	100	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		65	67	69	70	72	74	
		Meningkatkan Kualitas Cakupan Pelayanan Kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Indeks SPM		10	25	38	52	68	84	
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		43,5	49	53	53,7	60,65	64	
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.Persentase LKD, LAD, dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Diberdayakan		19	22	22	23	24	24	
			2. Persentase Desa tertib administrasi serta terfasilitasi Kerja sama desa dan penataan desa		66	69	71	74	76	79	

Sumber: Dinsos,PPPAPMPD Kab. Mempawah

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.







Gambar 3.1 Pohon Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi

dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Tujuan : Meningkatnya jenis layanan yang diberikan kepada PPPKS Sasaran : Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan	Meningkatkan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
2	Terbatasnya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi serta PSKS tersertifikasi yang menyebabkan rendahnya kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi PPPKS		Berkembangnya kelembagaan sosial peduli permasalahan kesejahteraan sosial, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di masyarakat
3	Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terkesan stagnan		Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui media sosial sebagai lembaga kontrol terhadap layanan kesejahteraan sosial.
4			Perbaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
5			Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data yang berada
6	Belum optimalnya fasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan Belum maksimalnya pemahaman oleh banyak sektor tentang pemenuhan Hak Anak	Tujuan : Meningkatnya jenis layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan Sasaran : Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan bagi perempuan dan anak Korban kekerasan Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan hak anak di semua klaster melalui fasilitasi identifikasi kebutuhan pelayanan, penyusunan Standar Operasional Prosedur, penyusunan Standar Pelayanan, penguatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan kompetensi aparaturnya dan petugas pelayanan, serta peningkatan intensitas monitoring dan evaluasi Peningkatan sinergitas melalui forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga Meningkatkan pemahaman dan mekanisme kerjasama Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan SDM Terlatih Memberikan informasi yang tepat tentang alur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan Meningkatkan sarana dan Prasarana Selter/ Rumah Aman

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
7	Belum Optimalnya Pembinaan LKD, LAD, Masyarakat Hukum Adat dan Usaha Ekomi Masyarkat serta Kurang tertibnya penyelesaian dokumen administrasi yang dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM Kurangnya pemahaman aparaturn pemerintah desa dan masyarakat akan pentingnya penetapan dan penegasan batas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Sasaran : Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa,peningkatan kerja sama desa,pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan data regsosok untuk pengembangan ekonomi lokal, disertai digitalisasi dan penyelarasan pengelolaan Lembaga ekonomi lokal (koperasi, Bumdes,UMKM) Optimalisasi Penguatan dan peningkatan peran BUMdesa dan Bumdes Bersama (BUMDesma) Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat dan social budaya local Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Menguatkan tata kelola administrasi Pemerintahan Desa Memfasilitasi Penataan Desa dan Kerjasama desa Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahandan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa Peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan Penguatan kapasitas Lembaga dan Sumber Daya Masyarakat

3.2.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas data	Inovasi Pelayanan	Pemantapan Pelayanan Administrasi	Evaluasi dan Pelaporan
1. Optimalisasi pelayanan rehabilitasi Sosial di rumah singgah 2. Pengadaan Rumah Singgah untuk Tingkat Kabupaten 3. Sarana dan Prasarana pada Rumah singgah untuk menunjang pelayanan PPKS	1 Optimalisasi verifikasi dan validasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)	Peningkatan SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) Dinas Sosial, dan Desa	Peningkatan Kapasitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) , yang dilakukan melalui Bimtek dan Pelatihan	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan dan penyusunan roadmap keberlanjutan program sosial periode berikutnya
1. Optimalisasi pelayanan rehabilitasi Sosial di rumah singgah 2. Pengadaan Rumah Singgah untuk Tingkat Kabupaten 3. Sarana dan Prasarana pada Rumah singgah untuk menunjang pelayanan PPKS	2. Menginventarisir data gender dan anak	Meningkatkan program DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak)	Peningkatan SDM Terlatih Bidang PPPA	Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak secara universal
3. Optimalisasi peran tugas, Fungsi,wewenang LKD,LAD dan Usaha Ekonomi Masyarakat	3. Optimalisasi Penataan data (LKD,LAD dan Usaha Ekonomi Masyarakat)	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas POSYANTEK (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna)	peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana LKD,LAD dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelaporan LKD, LAD dan kelompok usaha Ekonomi Masyarakat
4. Optimalisasi pelayanan terhadap Pemerintahan Desa	4. Menginventarisir data administrasi Pemerintahan Desa sebagai bahan analisa	Peningkatan server aplikasi keuangan desa dan aset desa untuk memperlancar penggunaan penggunaan Aplikasi berbasis online	Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam rangka penguatan Penyelenggaraan pemerintahan desa	eningkatan Ketaatan Pembuatan Laporan pemerintahan desa agar tertib administrasi

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

3.2.3 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kelompok rentan dalam semua aspek pembangunan	Meningkatkan mutu standar permakanan	
2	Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya keberfungsian sosial PPKS	
3	Mengoptimalkan kualitas data PPKS		Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pelayanan rehabilitasi sosial	
4	Meningkatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial Penduduk Miskin		Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender	
5	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap perempuan dan anak		Menyatukan komitmen bersama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	
6	Mencegah dan menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		Meningkatkan pemahaman dan mekanisme kerjasama Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
7	Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya		Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat	

	pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak		desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	
8	Menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak		Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna. i. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa	
9	Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai aktor perubahan sosial		Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi	
10	Penguatan Lembaga ekonomi desa dan perluasan akses permodalan serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat			
11	Meningkatkan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai			
12	Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta Pengelolaan keuangan dan aset desa yang tertib dan transparan			

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

**Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Kabupaten Mempawah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Menurunnya kemiskinan daerah. 2. Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan kesetaraan gender.	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Kualitas Layanan Terhadap Perempuan Dan Anak, Serta Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa				1. Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks) 3. Indeks Desa (%)		
		Meningkatkan Kualitas Cakupan Pelayanan Kesejahteraan sosial bagi masyarakat			Persentase Cakupan standar pelayanan minimal bidang sosial		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase pendamping sosial yang terfasilitasi (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah	Persentase Penerbitan Perizinan dan Rekomodendasi	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal KewenanganKabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosia	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terlaksannya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (%)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap	Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Jumlah Tagana Yang Mendapat Sosialisasi / Pelatihan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah Yang Dikelola (%)	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terpelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya penyelenggaraan PUG		Persentase Anggaran Responsif Gender Pada Belanja Langsung APBD	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang pada organisasi kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Yang Mendapatkan Sosialisasi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya penyediaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Rujukan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten / Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan social budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di Tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	
			Terjamninya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Persentase Lembaga yang mendapatkan Advokasi dalam Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Anak Yang Mengikuti Kegiatan Forum Anak Daerah	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Jumlah Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Anak Korban Yang Mendapatkan Layanan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
			Meningkatnya Desa yang terfasilitasi Penataan Desa		Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Desa	Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerjasama Secara Aktif	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Jumlah Bumdesa dan Bumdesma yang berstatus Maju Persentase Desa Dengan Administrasi Pemerintahan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Masyarakat yang diberdayakan	Lembaga yang	Persentase Lembaga Yang Mendapatkan Penguatan/Pemberdayaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Mendapatkan Penguatan/Pemberdayaan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

Sumber: Dinsos,PPPAPMPD Kab. Mempawah

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya :

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.342.540.180,00		9.078.378.184,00		9.457.712.907,00		9.886.548.549,00		10.335.325.980,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.937.443.404,00		6.460.144.806,00		6.704.817.863,00		6.978.008.756,00		7.264.859.194,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	90	90	4.937.443.404,00	90	6.460.144.806,00	90	6.704.817.863,00	90	6.978.008.756,00	90	7.264.859.194,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.028.900,00		35.730.345,00		37.516.863,00		39.392.885,00		41.362.340,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.000.000,00	1	4.200.000,00	1	4.410.000,00	1	4.630.500,00	1	4.862.025,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	3.999.900,00	2	4.199.895,00	2	4.409.890,00	2	4.630.384,00	2	4.861.903,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.569.500,00	1	2.697.975,00	1	2.832.874,00	1	2.974.517,00	1	3.123.243,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	14.999.700,00	3	15.749.685,00	3	16.537.169,00	3	17.364.028,00	3	18.232.229,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	3.500.200,00	2	3.675.210,00	2	3.858.971,00	2	4.051.919,00	2	4.254.515,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4.959.600,00	2	5.207.580,00	2	5.467.959,00	2	5.741.537,00	2	6.028.425,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.959.600,00		5.207.580,00		5.467.959,00		5.741.537,00		6.028.425,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4.959.600,00	2	5.207.580,00	2	5.467.959,00	2	5.741.537,00	2	6.028.425,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.569.500,00		2.697.975,00		2.832.874,00		2.974.517,00		3.123.243,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.569.500,00	1	2.697.975,00	1	2.832.874,00	1	2.974.517,00	1	3.123.243,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.000.000,00		4.200.000,00		4.410.000,00		4.630.500,00		4.862.025,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.000.000,00	1	4.200.000,00	1	4.410.000,00	1	4.630.500,00	1	4.862.025,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.500.200,00		3.675.210,00		3.858.971,00		4.051.919,00		4.254.515,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	3.500.200,00	2	3.675.210,00	2	3.858.971,00	2	4.051.919,00	2	4.254.515,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.999.900,00		4.199.895,00		4.409.890,00		4.630.384,00		4.861.903,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	3.999.900,00	2	4.199.895,00	2	4.409.890,00	2	4.630.384,00	2	4.861.903,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.999.700,00		15.749.685,00		16.537.169,00		17.364.028,00		18.232.229,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	14.999.700,00	3	15.749.685,00	3	16.537.169,00	3	17.364.028,00	3	18.232.229,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.268.097.004,00		4.481.501.854,00		4.705.576.947,00		4.940.855.795,00		5.187.898.585,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	14.998.000,00	1	15.747.900,00	1	16.535.295,00	1	17.362.060,00	1	18.230.163,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	25.996.200,00	12	27.296.010,00	12	28.660.811,00	12	30.093.851,00	12	31.598.544,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	4.999.200,00	1	5.249.160,00	1	5.511.618,00	1	5.787.199,00	1	6.076.559,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	37	4.222.103.604,00	37	4.433.208.784,00	37	4.654.869.223,00	37	4.887.612.685,00	37	5.131.993.319,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.222.103.604,00		4.433.208.784,00		4.654.869.223,00		4.887.612.685,00		5.131.993.319,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	37	4.222.103.604,00	37	4.433.208.784,00	37	4.654.869.223,00	37	4.887.612.685,00	37	5.131.993.319,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25.996.200,00		27.296.010,00		28.660.811,00		30.093.851,00		31.598.544,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	25.996.200,00	12	27.296.010,00	12	28.660.811,00	12	30.093.851,00	12	31.598.544,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14.998.000,00		15.747.900,00		16.535.295,00		17.362.060,00		18.230.163,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	14.998.000,00	1	15.747.900,00	1	16.535.295,00	1	17.362.060,00	1	18.230.163,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.999.200,00		5.249.160,00		5.511.618,00		5.787.199,00		6.076.559,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	4.999.200,00	1	5.249.160,00	1	5.511.618,00	1	5.787.199,00	1	6.076.559,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				11.698.500,00		12.283.425,00		12.897.596,00		13.542.476,00		14.219.600,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	11.698.500,00	12	12.283.425,00	12	12.897.596,00	12	13.542.476,00	12	14.219.600,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				11.698.500,00		12.283.425,00		12.897.596,00		13.542.476,00		14.219.600,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	11.698.500,00	12	12.283.425,00	12	12.897.596,00	12	13.542.476,00	12	14.219.600,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000,00		56.750.000,00		59.587.500,00		62.566.875,00		65.695.219,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	40	30.500.000,00	40	32.025.000,00	40	33.626.250,00	40	35.307.563,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50	50	25.000.000,00	50	26.250.000,00	50	27.562.500,00	50	28.940.625,00	50	30.387.656,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		30.500.000,00		32.025.000,00		33.626.250,00		35.307.563,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	40	30.500.000,00	40	32.025.000,00	40	33.626.250,00	40	5.307.563,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.656,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50	50	25.000.000,00	50	26.250.000,00	50	27.562.500,00	50	28.940.625,00	50	30.387.656,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				132.095.700,00		138.700.485,00		145.635.510,00		152.917.285,00		160.563.149,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	18.996.600,00	1	19.946.430,00	1	20.943.752,00	1	21.990.939,00	1	23.090.486,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	4.999.900,00	1	5.249.895,00	1	5.512.390,00	1	5.788.009,00	1	6.077.410,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	35	75.000.000,00	35	78.750.000,00	35	82.687.500,00	35	86.821.875,00	35	91.162.969,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	8.160.000,00	1	8.568.000,00	1	8.996.400,00	1	9.446.220,00	1	9.918.531,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-		-		-		-		-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	4.995.100,00	1	5.244.855,00	1	5.507.098,00	1	5.782.453,00	1	6.071.575,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	19.944.100,00	1	20.941.305,00	1	21.988.370,00	1	23.087.789,00	1	24.242.178,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.995.100,00		5.244.855,00		5.507.098,00		5.782.453,00		6.071.575,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	4.995.100,00	1	5.244.855,00	1	5.507.098,00	1	5.782.453,00	1	6.071.575,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.944.100,00		20.941.305,00		21.988.370,00		23.087.789,00		24.242.178,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	19.944.100,00	1	20.941.305,00	1	21.988.370,00	1	23.087.789,00	1	24.242.178,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.160.000,00		8.568.000,00		8.996.400,00		9.446.220,00		9.918.531,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	8.160.000,00	1	8.568.000,00	1	8.996.400,00	1	9.446.220,00	1	9.918.531,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.996.600,00		19.946.430,00		20.943.752,00		21.990.939,00		23.090.486,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	18.996.600,00	1	19.946.430,00	1	20.943.752,00	1	21.990.939,00	1	23.090.486,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				-		-		-		-		-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-		-		-		-		-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		78.750.000,00		82.687.500,00		86.821.875,00		91.162.969,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	35	75.000.000,00	35	78.750.000,00	35	82.687.500,00	35	86.821.875,00	35	91.162.969,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.999.900,00		5.249.895,00		5.512.390,00		5.788.009,00		6.077.410,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	4.999.900,00	1	5.249.895,00	1	5.512.390,00	1	5.788.009,00	1	6.077.410,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				277.497.700,00		1.532.372.585,00		1.546.941.215,00		1.562.238.275,00		1.578.300.189,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	14	187.891.500,00	14	197.286.075,00	14	207.150.379,00	14	217.507.898,00	14	228.383.293,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	9	141.000.000,00	9	141.000.000,00	9	141.000.000,00	9	141.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	78	78	89.606.200,00	78	194.086.510,00	78	198.790.836,00	78	203.730.377,00	78	208.916.896,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	0	-	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	0	-	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				89.606.200,00		194.086.510,00		198.790.836,00		203.730.377,00		208.916.896,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	78	78	89.606.200,00	78	194.086.510,00	78	198.790.836,00	78	203.730.377,00	78	208.916.896,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				187.891.500,00		197.286.075,00		207.150.379,00		217.507.898,00		228.383.293,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Desa	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	14	187.891.500,00	14	197.286.075,00	14	207.150.379,00	14	217.507.898,00	14	228.383.293,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		141.000.000,00		141.000.000,00		141.000.000,00		141.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	9	141.000.000,00	9	141.000.000,00	9	141.000.000,00	9	141.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		109.242.000,00		114.704.100,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	100.000.000,00	3	102.000.000,00	3	104.040.000,00	3	109.242.000,00	3	114.704.100,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		109.242.000,00		114.704.100,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	100.000.000,00	3	102.000.000,00	3	104.040.000,00	3	109.242.000,00	3	114.704.100,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89.025.600,00		100.806.112,00		92.622.232,00		97.253.165,00		102.116.012,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	22.849.100,00	1	23.306.082,00	1	23.772.204,00	1	24.960.814,00	1	26.208.855,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	12.907.300,00	2	13.165.446,00	2	13.428.755,00		14.100.193,00		14.805.202,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	40.069.200,00	6	50.870.584,00	6	41.687.996,00	6	43.772.395,00	6	45.961.015,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	6.100.000,00	6	6.222.000,00	6	6.346.437,00	6	6.663.581,00	6	6.996.949,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	7.100.000,00	12	7.242.000,00	12	7.386.840,00	12	7.756.182,00	12	8.143.991,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.849.100,00		23.306.082,00		23.772.204,00		24.960.814,00		26.208.855,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	22.849.100,00	1	23.306.082,00	1	23.772.204,00	1	24.960.814,00	1	26.208.855,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.069.200,00		50.870.584,00		41.687.996,00		43.772.395,00		45.961.015,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	40.069.200,00	6	50.870.584,00	6	41.687.996,00	6	43.772.395,00	6	45.961.015,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.907.300,00		13.165.446,00		13.428.755,00		14.100.193,00		14.805.202,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	12.907.300,00	2	13.165.446,00	2	13.428.755,00	2	14.100.193,00	2	14.805.202,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.100.000,00		7.242.000,00		7.386.840,00		7.756.182,00		8.143.991,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	7.100.000,00	12	7.242.000,00	12	7.386.840,00	12	7.756.182,00	12	8.143.991,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.100.000,00		6.222.000,00		6.346.437,00		6.663.581,00		6.996.949,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6	6	6.100.000,00	6	6.222.000,00	6	6.346.437,00	6	6.663.581,00	6	6.996.949,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dipelihara/Direhabilitasi												Desa	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				948.380.640,00		999.583.987,00		1.049.563.186,00		1.102.041.345,00		1.157.143.413,00		
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pendamping sosial yang terfasilitasi	100	100	948.380.640,00	100	999.583.987,00	100	1.049.563.186,00	100	1.102.041.345,00	100	1.157.143.413,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.919.700,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Persentase Penerbitan Perizinan dan Rekomendasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	10	5.919.700,00	10	10.000.000,00	10	10.500.000,00	10	11.025.000,00	10	11.576.250,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				5.919.700,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	10	5.919.700,00	10	10.000.000,00	10	10.500.000,00	10	11.025.000,00	10	11.576.250,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				942.460.940,00		989.583.987,00		1.039.063.186,00		1.091.016.345,00		1.145.567.163,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Persentase Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30		499.999.900,00	2	524.999.895,00	2	551.249.890,00	2	578.812.384,00	2	607.753.003,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	9	14	193.457.728,00	30	203.130.614,00	30	213.287.145,00	30	223.951.502,00	30	235.149.077,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	9	9	139.204.440,00	9	146.164.662,00	9	153.472.894,00	9	161.146.540,00	9	169.203.868,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	10	66.718.200,00	11	70.054.110,00	12	73.556.816,00	13	77.234.656,00	14	81.096.389,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	85	8	43.080.672,00	4	45.234.706,00	4	47.496.441,00	4	49.871.263,00	4	52.364.826,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				66.718.200,00		70.054.110,00		73.556.816,00		77.234.656,00		81.096.389,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	10	66.718.200,00	11	70.054.110,00	12	73.556.816,00	13	77.234.656,00	14	81.096.389,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				499.999.900,00		524.999.895,00		551.249.890,00		578.812.384,00		607.753.003,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30		499.999.900,00	2	524.999.895,00	2	551.249.890,00	2	578.812.384,00	2	607.753.003,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				43.080.672,00		45.234.706,00		47.496.441,00		49.871.263,00		52.364.826,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	85	8	43.080.672,00	4	45.234.706,00	4	47.496.441,00	4	49.871.263,00	4	52.364.826,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				193.457.728,00		203.130.614,00		213.287.145,00		223.951.502,00		235.149.077,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	9	14	193.457.728,00	30	203.130.614,00	30	213.287.145,00	30	223.951.502,00	30	235.149.077,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				139.204.440,00		146.164.662,00		153.472.894,00		161.146.540,00		169.203.868,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	9	9	139.204.440,00	9	146.164.662,00	9	153.472.894,00	9	161.146.540,00	9	169.203.868,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				14.149.500,00		14.856.975,00		15.599.824,00		16.379.815,00		17.198.806,00		
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	100	14.149.500,00	100	14.856.975,00	100	15.599.824,00	100	16.379.815,00	100	17.198.806,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				14.149.500,00		14.856.975,00		15.599.824,00		16.379.815,00		17.198.806,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	14.149.500,00	10	14.856.975,00	10	15.599.824,00	10	16.379.815,00	10	17.198.806,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				14.149.500,00		14.856.975,00		15.599.824,00		16.379.815,00		17.198.806,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	14.149.500,00	10	14.856.975,00	10	15.599.824,00	10	16.379.815,00	10	17.198.806,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				723.277.300,00		759.441.164,00		797.413.220,00		837.283.881,00		879.148.077,00		
MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	100	723.277.300,00	100	759.441.164,00	100	797.413.220,00	100	837.283.881,00	100	879.148.077,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				343.980.020,00		361.179.020,00		379.237.970,00		398.199.868,00		418.109.863,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15	50	173.731.936,00	15	182.418.532,00	15	191.539.459,00	15	201.116.432,00	15	211.172.254,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	10	30.863.184,00	10	32.406.343,00	10	34.026.660,00	10	35.727.993,00	10	37.514.393,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	175	25	47.525.000,00	30	49.901.250,00	35	52.396.312,00	40	55.016.128,00	45	57.766.934,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	10	10.225.000,00	10	10.736.250,00	10	11.273.062,00	10	11.836.715,00	10	12.428.551,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1060	150	49.786.000,00	166	52.275.300,00	182	54.889.065,00	198	57.633.518,00	214	60.515.194,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	175	150	31.848.900,00	166	33.441.345,00	182	35.113.412,00	198	36.869.082,00	214	38.712.537,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				49.786.000,00		52.275.300,00		54.889.065,00		57.633.518,00		60.515.194,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1060	150	49.786.000,00	166	52.275.300,00	182	54.889.065,00	198	57.633.518,00	214	60.515.194,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				31.848.900,00		33.441.345,00		35.113.412,00		36.869.082,00		38.712.537,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	175	150	31.848.900,00	166	33.441.345,00	182	35.113.412,00	198	36.869.082,00	214	38.712.537,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				47.525.000,00		49.901.250,00		52.396.312,00		55.016.128,00		57.766.934,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	175	25	47.525.000,00	30	49.901.250,00	35	52.396.312,00	40	55.016.128,00	45	57.766.934,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04.2.01.0005 – Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				173.731.936,00		182.418.532,00		191.539.459,00		201.116.432,00		211.172.254,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15	50	173.731.936,00	15	182.418.532,00	15	191.539.459,00	15	201.116.432,00	15	211.172.254,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				10.225.000,00		10.736.250,00		11.273.062,00		11.836.715,00		12.428.551,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	10	10.225.000,00	10	10.736.250,00	10	11.273.062,00	10	11.836.715,00	10	12.428.551,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				30.863.184,00		32.406.343,00		34.026.660,00		35.727.993,00		37.514.393,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	10	30.863.184,00	10	32.406.343,00	10	34.026.660,00	10	35.727.993,00	10	37.514.393,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				379.297.280,00		398.262.144,00		418.175.250,00		439.084.013,00		461.038.214,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	9564	9564	345.416.980,00	9564	362.687.829,00	9564	380.822.220,00	9564	399.863.331,00	9564	419.856.498,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200	40	21.309.800,00	40	22.375.290,00	40	23.494.054,00	40	24.668.757,00	40	25.902.195,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	1	12.570.500,00	1	13.199.025,00	1	13.858.976,00	1	14.551.925,00	1	15.279.521,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04.2.02.0007 – Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				21.309.800,00		22.375.290,00		23.494.054,00		24.668.757,00		25.902.195,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200	40	21.309.800,00	40	22.375.290,00	40	23.494.054,00	40	24.668.757,00	40	25.902.195,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04.2.02.0008 – Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				345.416.980,00		362.687.829,00		380.822.220,00		399.863.331,00		419.856.498,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	9564	9564	345.416.980,00	9564	362.687.829,00	9564	380.822.220,00	9564	399.863.331,00	9564	419.856.498,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				12.570.500,00		13.199.025,00		13.858.976,00		14.551.925,00		15.279.521,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	1	12.570.500,00	1	13.199.025,00	1	13.858.976,00	1	14.551.925,00	1	15.279.521,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				262.022.968,00		275.124.116,00		288.880.322,00		303.324.336,00		318.490.552,00		
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM	100	100	262.022.968,00	100	275.124.116,00	100	288.880.322,00	100	303.324.336,00	100	318.490.552,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				70.815.100,00		74.355.855,00		78.073.648,00		81.977.329,00		86.076.195,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksannya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	350	100	50.815.700,00	55	53.356.485,00	60	56.024.309,00	65	58.825.524,00	70	61.766.800,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	130	50	19.999.400,00	20	20.999.370,00	20	22.049.339,00	20	23.151.805,00	20	24.309.395,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				50.815.700,00		53.356.485,00		56.024.309,00		58.825.524,00		61.766.800,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	350	100	50.815.700,00	55	53.356.485,00	60	56.024.309,00	65	58.825.524,00	70	61.766.800,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				19.999.400,00		20.999.370,00		22.049.339,00		23.151.805,00		24.309.395,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	130	50	19.999.400,00	20	20.999.370,00	20	22.049.339,00	20	23.151.805,00	20	24.309.395,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				191.207.868,00		200.768.261,00		210.806.674,00		221.347.007,00		232.414.357,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	161258	161258	50.961.568,00	12000	53.509.646,00	13000	56.185.128,00	14000	58.994.385,00	15000	61.944.104,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10000	6000	60.000.000,00	20000	63.000.000,00	2000	66.150.000,00	2000	69.457.500,00	2000	72.930.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130	10	66.718.100,00	30	70.054.005,00	30	73.556.705,00	30	77.234.540,00	30	81.096.267,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	60	320	13.528.200,00	320	14.204.610,00	320	14.914.841,00	320	15.660.582,00	320	16.443.611,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				50.961.568,00		53.509.646,00		56.185.128,00		58.994.385,00		61.944.104,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	161258	161258	50.961.568,00	12000	53.509.646,00	13000	56.185.128,00	14000	58.994.385,00	15000	61.944.104,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				66.718.100,00		70.054.005,00		73.556.705,00		77.234.540,00		81.096.267,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130	10	66.718.100,00	30	70.054.005,00	30	73.556.705,00	30	77.234.540,00	30	81.096.267,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		72.930.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10000	6000	60.000.000,00	20000	63.000.000,00	2000	66.150.000,00	2000	69.457.500,00	2000	72.930.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				13.528.200,00		14.204.610,00		14.914.841,00		15.660.582,00		16.443.611,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	60	320	13.528.200,00	320	14.204.610,00	320	14.914.841,00	320	15.660.582,00	320	16.443.611,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				227.570.900,00		260.546.895,00		273.574.239,00		287.252.951,00		301.615.599,00		
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100	100	227.570.900,00	100	260.546.895,00	100	273.574.239,00	100	287.252.951,00	100	301.615.599,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				207.001.900,00		217.351.995,00		228.219.594,00		239.630.574,00		251.612.103,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6400	1000	100.000.000,00	1200	105.000.000,00	1300	110.250.000,00	1400	115.762.500,00	1500	121.550.625,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	6400	1000	107.001.900,00	1200	112.351.995,00	1300	117.969.594,00	1400	123.868.074,00	1500	130.061.478,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				107.001.900,00		112.351.995,00		117.969.594,00		123.868.074,00		130.061.478,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	6400	1000	107.001.900,00	1200	112.351.995,00	1300	117.969.594,00	1400	123.868.074,00	1500	130.061.478,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		121.550.625,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6400	1000	100.000.000,00	1200	105.000.000,00	1300	110.250.000,00	1400	115.762.500,00	1500	121.550.625,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				20.569.000,00		43.194.900,00		45.354.645,00		47.622.377,00		50.003.496,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48	48	20.569.000,00	48	21.597.450,00	48	22.677.323,00	48	23.811.189,00	48	25.001.748,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12	0	-	2	21.597.450,00	2	22.677.322,00	2	23.811.188,00	2	25.001.748,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				-		21.597.450,00		22.677.322,00		23.811.188,00		25.001.748,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12	0	-	2	21.597.450,00	2	22.677.322,00	2	23.811.188,00	2	25.001.748,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				20.569.000,00		21.597.450,00		22.677.323,00		23.811.189,00		25.001.748,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48	48	20.569.000,00	48	21.597.450,00	48	22.677.323,00	48	23.811.189,00	48	25.001.748,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				229.695.468,00		308.680.241,00		327.864.253,00		362.257.465,00		396.870.339,00		
MEINGKATNYA TATA KELOLA TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah Yang Dikelola	65	70	229.695.468,00	75	308.680.241,00	80	327.864.253,00	90	362.257.465,00	100	396.870.339,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				229.695.468,00		308.680.241,00		327.864.253,00		362.257.465,00		396.870.339,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	150.000.000,00	1	225.000.000,00	1	240.000.000,00	1	270.000.000,00	1	300.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	19.047.768,00	1	20.000.156,00	1	21.000.164,00	1	22.050.172,00	1	23.152.681,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7	7	60.647.700,00	7	63.680.085,00	7	66.864.089,00	7	70.207.293,00	7	73.717.658,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				150.000.000,00		225.000.000,00		240.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	150.000.000,00	1	225.000.000,00	1	240.000.000,00	1	270.000.000,00	1	300.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				60.647.700,00		63.680.085,00		66.864.089,00		70.207.293,00		73.717.658,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7	7	60.647.700,00	7	63.680.085,00	7	66.864.089,00	7	70.207.293,00	7	73.717.658,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				19.047.768,00		20.000.156,00		21.000.164,00		22.050.172,00		23.152.681,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	19.047.768,00	1	20.000.156,00	1	21.000.164,00	1	22.050.172,00	1	23.152.681,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.259.845.418,00		1.463.649.651,00		1.545.082.123,00		1.638.036.238,00		1.715.790.552,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				87.499.168,00		91.874.126,00		96.467.821,00		101.291.223,00		106.355.785,00		
Meningkatnya penyelenggaraan PUG	Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	100	100	87.499.168,00	100	91.874.126,00	100	96.467.821,00	100	101.291.223,00	100	106.355.785,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				17.500.100,00		18.375.105,00		19.293.850,00		20.258.553,00		21.271.481,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	70	70	17.500.100,00	70	18.375.105,00	70	19.293.850,00	70	20.258.553,00	70	21.271.481,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				17.500.100,00		18.375.105,00		19.293.850,00		20.258.553,00		21.271.481,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	70	70	17.500.100,00	70	18.375.105,00	70	19.293.850,00	70	20.258.553,00	70	21.271.481,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				49.999.800,00		52.499.790,00		55.124.779,00		57.881.018,00		60.775.069,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang pada organisasi kemasyarakatan	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50	50	49.999.800,00	50	52.499.790,00	50	55.124.779,00	50	57.881.018,00	50	60.775.069,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				49.999.800,00		52.499.790,00		55.124.779,00		57.881.018,00		60.775.069,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50	50	49.999.800,00	50	52.499.790,00	50	55.124.779,00	50	57.881.018,00	50	60.775.069,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				19.999.268,00		20.999.231,00		22.049.192,00		23.151.652,00		24.309.235,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2	2	19.999.268,00	2	20.999.231,00	2	22.049.192,00	2	23.151.652,00	2	24.309.235,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				19.999.268,00		20.999.231,00		22.049.192,00		23.151.652,00		24.309.235,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2	2	19.999.268,00	2	20.999.231,00	2	22.049.192,00	2	23.151.652,00	2	24.309.235,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				72.084.500,00		150.716.150,00		166.501.958,00		181.527.055,00		198.955.908,00		
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Ditangani	100	100	72.084.500,00	100	150.716.150,00	100	166.501.958,00	100	181.527.055,00	100	198.955.908,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				19.021.500,00		75.000.000,00		87.000.000,00		99.100.000,00		111.305.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	0	0	-	10	25.000.000,00	10	26.250.000,00	10	27.562.500,00	10	28.940.625,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2	19.021.500,00	3	35.000.000,00	4	45.000.000,00	6	55.000.000,00	8	65.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	9	15.000.000,00	9	15.750.000,00	9	16.537.500,00	9	17.364.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				-		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	9	15.000.000,00	9	15.750.000,00	9	16.537.500,00	9	17.364.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				19.021.500,00		35.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2	19.021.500,00	3	35.000.000,00	4	45.000.000,00	6	55.000.000,00	8	65.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	0	0	-	10	25.000.000,00	10	26.250.000,00	10	27.562.500,00	10	28.940.625,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				32.604.800,00		54.235.040,00		56.946.792,00		58.744.131,00		62.783.838,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya penyediaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	15	15	19.845.300,00	15	20.837.565,00	15	21.879.443,00	15	22.973.415,00	15	24.122.086,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15	15	12.759.500,00	15	13.397.475,00	15	14.067.349,00	15	14.770.716,00	15	15.509.252,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	-	15	20.000.000,00	15	21.000.000,00	15	21.000.000,00	15	23.152.500,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				19.845.300,00		20.837.565,00		21.879.443,00		22.973.415,00		24.122.086,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	15	15	19.845.300,00	15	20.837.565,00	15	21.879.443,00	15	22.973.415,00	15	24.122.086,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03.2.02.0008 – Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				12.759.500,00		13.397.475,00		14.067.349,00		14.770.716,00		15.509.252,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15	15	12.759.500,00	15	13.397.475,00	15	14.067.349,00	15	14.770.716,00	15	15.509.252,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03.2.02.0009 – Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				-		20.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		23.152.500,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	-	15	20.000.000,00	15	21.000.000,00	15	21.000.000,00	15	23.152.500,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.458.200,00		21.481.110,00		22.555.166,00		23.682.924,00		24.867.070,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	15	15	20.458.200,00	15	21.481.110,00	15	22.555.166,00	15	23.682.924,00	15	24.867.070,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				20.458.200,00		21.481.110,00		22.555.166,00		23.682.924,00		24.867.070,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	15	15	20.458.200,00	15	21.481.110,00	15	22.555.166,00	15	23.682.924,00	15	24.867.070,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				263.521.100,00		285.609.585,00		299.890.064,00		314.884.567,00		330.628.796,00		
MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM MENDUKUNG KESETARAAN GENDER, PEMENUHAN HAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga	90	100	263.521.100,00	100	285.609.585,00	100	299.890.064,00	100	314.884.567,00	100	330.628.796,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.083.400,00		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1	2	20.083.400,00	2	30.000.000,00	2	31.500.000,00	2	33.075.000,00	2	34.728.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				20.083.400,00		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1	2	20.083.400,00	2	30.000.000,00	2	31.500.000,00	2	33.075.000,00	2	34.728.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				243.437.700,00		255.609.585,00		268.390.064,00		281.809.567,00		295.900.046,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	10	10	243.437.700,00	10	255.609.585,00	10	268.390.064,00	10	281.809.567,00	10	295.900.046,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				243.437.700,00		255.609.585,00		268.390.064,00		281.809.567,00		295.900.046,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	10	10	243.437.700,00	10	255.609.585,00	10	268.390.064,00	10	281.809.567,00	10	295.900.046,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				483.999.400,00		535.449.790,00		562.222.280,00		590.333.393,00		619.850.063,00		
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif	Kategori Kabupaten Layak Anak	601-700	601-700	483.999.400,00	601-700	535.449.790,00	601-700	562.222.280,00	601-700	590.333.393,00	601-700	619.850.063,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				483.999.400,00		535.449.790,00		562.222.280,00		590.333.393,00		619.850.063,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	9	15.000.000,00	9	15.750.000,00	9	16.537.500,00	9	17.364.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	35	35	54.999.600,00	35	70.000.000,00	35	73.500.000,00	35	77.175.000,00	35	81.033.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	428.999.800,00	10	450.449.790,00	10	472.972.280,00	10	496.620.893,00	10	521.451.938,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				54.999.600,00		70.000.000,00		73.500.000,00		77.175.000,00		81.033.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	umlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	35	35	54.999.600,00	35	70.000.000,00	35	73.500.000,00	35	77.175.000,00	35	81.033.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				428.999.800,00		450.449.790,00		472.972.280,00		496.620.893,00		521.451.938,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	428.999.800,00	10	450.449.790,00	10	472.972.280,00	10	496.620.893,00	10	521.451.938,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	9	15.000.000,00	9	15.750.000,00	9	16.537.500,00	9	17.364.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				352.741.250,00		400.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00		460.000.000,00		
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pendampingan	100	100	352.741.250,00	100	400.000.000,00	100	420.000.000,00	100	450.000.000,00	100	460.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				24.417.600,00		55.260.167,00		58.023.176,00		69.924.334,00		60.920.551,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1	1	24.417.600,00	1	55.260.167,00	1	58.023.176,00	1	69.924.334,00	1	60.920.551,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				24.417.600,00		55.260.167,00		58.023.176,00		69.924.334,00		60.920.551,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1	1	24.417.600,00	1	55.260.167,00	1	58.023.176,00	1	69.924.334,00	1	60.920.551,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				182.463.800,00		191.586.991,00		201.166.339,00		211.224.656,00		221.785.889,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	40	40	20.000.000,00	40	21.000.000,00	40	22.050.000,00	40	23.152.500,00	40	24.310.125,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40	40	37.442.830,00	40	39.314.972,00	40	41.280.720,00	40	43.344.756,00	40	45.511.994,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	40	40	125.020.970,00	40	131.272.019,00	40	137.835.619,00	40	144.727.400,00	40	151.963.770,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.07.2.02.0008 – Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				125.020.970,00		131.272.019,00		137.835.619,00		144.727.400,00		151.963.770,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	40	40	125.020.970,00	40	131.272.019,00	40	137.835.619,00	40	144.727.400,00	40	151.963.770,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.07.2.02.0013 – Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	40	40	20.000.000,00	40	21.000.000,00	40	22.050.000,00	40	23.152.500,00	40	24.310.125,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				37.442.830,00		39.314.972,00		41.280.720,00		43.344.756,00		45.511.994,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40	40	37.442.830,00	40	39.314.972,00	40	41.280.720,00	40	43.344.756,00	40	45.511.994,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				145.859.850,00		153.152.842,00		160.810.485,00		168.851.010,00		177.293.560,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	-	2	145.859.850,00	2	153.152.842,00	2	160.810.485,00	2	168.851.010,00	2	177.293.560,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				145.859.850,00		153.152.842,00		160.810.485,00		168.851.010,00		177.293.560,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	-	2	145.859.850,00	2	153.152.842,00	2	160.810.485,00	2	168.851.010,00	2	177.293.560,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				7.510.621.000,00		8.296.867.440,00		9.010.873.154,00		9.262.334.478,00		9.832.850.151,00		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				19.499.600,00		71.025.000,00		71.576.250,00		72.155.063,00		72.762.816,00		
Meningkatnya Desa yang terfasilitasi Penataan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa	50	100	19.499.600,00	100	71.025.000,00	100	71.576.250,00	100	72.155.063,00	100	72.762.816,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				19.499.600,00		71.025.000,00		71.576.250,00		72.155.063,00		72.762.816,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0	1	8.999.600,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2	2	10.500.000,00	2	11.025.000,00	2	11.576.250,00	2	12.155.063,00	2	12.762.816,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00		12.762.816,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2	2	10.500.000,00	2	11.025.000,00	2	11.576.250,00	2	12.155.063,00	2	12.762.816,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				8.999.600,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0	1	8.999.600,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				-		19.399.600,00		20.369.580,00		21.388.059,00		22.457.462,00		
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama / Jumlah seluruh Desa)	100	100	-	100	19.399.600,00	100	20.369.580,00	100	21.388.059,00	100	22.457.462,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				-		19.399.600,00		20.369.580,00		21.388.059,00		22.457.462,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	-	1	8.899.600,00	1	9.344.580,00	1	9.811.809,00	1	10.302.399,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	1	-	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.063,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				-		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	1	-	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.063,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				-		8.899.600,00		9.344.580,00		9.811.809,00		10.302.399,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	-	1	8.899.600,00	1	9.344.580,00	1	9.811.809,00	1	10.302.399,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				1.426.061.100,00		1.673.129.525,00		2.058.948.343,00		1.965.813.426,00		2.174.503.047,00		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Bumdesa dan Bumdesma yang berstatus Maju	5	8	1.426.061.100,00	10	1.673.129.525,00	12	2.058.948.343,00	14	1.965.813.426,00	16	2.174.503.047,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas (berkualitas: peraturan desa APBDes, peraturan desan RKPDes, Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen RKPDes dan APBDes, Ketaatan Pajak, Aset Desa)	66	69		71		74		76		79		1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1.426.061.100,00		1.673.129.525,00		2.058.948.343,00		1.965.813.426,00		2.174.503.047,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	0	0	-	12	1.016.500.000,00	12	1.107.985.000,00	12	1.218.783.500,00	12	1.365.037.520,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	13	150.000.000,00		-	29	250.000.000,00		-		-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2	2	18.810.500,00	2	19.751.025,00	2	20.738.576,00	2	21.755.505,00	2	22.864.280,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	60	60	42.477.200,00	60	44.601.060,00	60	46.831.113,00	60	49.172.669,00	60	51.631.302,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1	1	37.476.800,00	3	39.350.640,00	3	41.318.172,00	3	43.384.081,00	3	45.553.285,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	3	3	9.188.500,00	3	13.872.750,00	3	17.917.575,00	3	23.292.848,00	3	30.280.702,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60	60	16.000.000,00	60	20.800.000,00	60	27.040.000,00	60	35.152.000,00	60	45.697.600,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	60	60	80.888.200,00	60	84.932.610,00	60	89.179.241,00	60	102.009.885,00	60	98.320.113,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	60	60	40.870.300,00	60	49.044.360,00	60	58.853.232,00	60	58.853.232,00	60	84.748.654,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			-	9	99.910.000,00	9	102.000.000,00	9	105.000.000,00	9	106.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15	4	80.349.600,00	4	84.367.080,00	4	88.585.434,00	4	93.014.706,00	4	97.665.441,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60	60	950.000.000,00	60	150.000.000,00	60	157.500.000,00	60	163.375.000,00	60	173.643.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0	0	-	60	50.000.000,00	60	51.000.000,00	60	52.020.000,00	60	53.060.400,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa				9.188.500,00		13.872.750,00		17.917.575,00		23.292.848,00		30.280.702,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	3	3	9.188.500,00	3	13.872.750,00	3	17.917.575,00	3	23.292.848,00	3	30.280.702,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				16.000.000,00		20.800.000,00		27.040.000,00		35.152.000,00		45.697.600,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60	60	16.000.000,00	60	20.800.000,00	60	27.040.000,00	60	35.152.000,00	60	45.697.600,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				80.888.200,00		84.932.610,00		89.179.241,00		102.009.885,00		98.320.113,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	60	60	80.888.200,00	60	84.932.610,00	60	89.179.241,00	60	102.009.885,00	60	98.320.113,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0005 – Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				950.000.000,00		150.000.000,00		157.500.000,00		163.375.000,00		173.643.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60	60	950.000.000,00	60	150.000.000,00	60	157.500.000,00	60	163.375.000,00	60	173.643.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa				18.810.500,00		19.751.025,00		20.738.576,00		21.755.505,00		22.864.280,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2	2	18.810.500,00	2	19.751.025,00	2	20.738.576,00	2	21.755.505,00	2	22.864.280,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				37.476.800,00		39.350.640,00		41.318.172,00		43.384.081,00		45.553.285,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1	1	37.476.800,00	3	39.350.640,00	3	41.318.172,00	3	43.384.081,00	3	45.553.285,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				150.000.000,00		-		250.000.000,00		-		-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	13	150.000.000,00		-	29	250.000.000,00		-		-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				42.477.200,00		44.601.060,00		46.831.113,00		49.172.669,00		51.631.302,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	60	60	42.477.200,00	60	44.601.060,00	60	46.831.113,00	60	49.172.669,00	60	51.631.302,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				-		1.016.500.000,00		1.107.985.000,00		1.218.783.500,00		1.365.037.520,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	0	0	-	12	1.016.500.000,00	12	1.107.985.000,00	12	1.218.783.500,00	12	1.365.037.520,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				40.870.300,00		49.044.360,00		58.853.232,00		58.853.232,00		84.748.654,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	60	60	40.870.300,00	60	49.044.360,00	60	58.853.232,00	60	58.853.232,00	60	84.748.654,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0014 – Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				-		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0	0	-	60	50.000.000,00	60	51.000.000,00	60	52.020.000,00	60	53.060.400,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa				80.349.600,00		84.367.080,00		88.585.434,00		93.014.706,00		97.665.441,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15	4	80.349.600,00	4	84.367.080,00	4	88.585.434,00	4	93.014.706,00	4	97.665.441,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				-		99.910.000,00		102.000.000,00		105.000.000,00		106.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			-	9	99.910.000,00	9	102.000.000,00	9	105.000.000,00	9	106.000.000,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				6.065.060.300,00		6.533.313.315,00		6.859.978.981,00		7.202.977.930,00		7.563.126.826,00		
Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Mendapatkan Penguatan/Pemberdayaan	19	26	6.065.060.300,00	30	6.533.313.315,00	34	6.859.978.981,00	34	7.202.977.930,00	37	7.563.126.826,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.065.060.300,00		6.533.313.315,00		6.859.978.981,00		7.202.977.930,00		7.563.126.826,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0	-	21	150.000.000,00	22	157.499.998,00	24	165.375.000,00	25	173.643.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	5	1.530.000.000,00	5	1.606.500.000,00	5	1.686.825.000,00	5	1.771.166.250,00	5	1.859.724.563,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	3.003.820.200,00	5	3.154.011.210,00	5	3.311.711.771,00	5	3.477.297.359,00	5	3.651.162.227,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	0	-	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	1.084.255.100,00	1	1.138.467.855,00	1	1.195.391.248,00	1	1.255.160.810,00	1	1.317.918.851,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	85.402.100,00	1	89.672.205,00	1	94.155.815,00	1	98.863.606,00	1	103.806.786,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	1	19.860.200,00	1	20.853.210,00	1	21.895.871,00	1	22.990.664,00	1	24.140.197,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	175.050.700,00	1	183.803.235,00	1	192.993.397,00	1	202.643.067,00	1	212.775.220,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	66.673.000,00	2	70.006.650,00	2	73.506.983,00	2	77.182.332,00	2	81.041.448,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	20	99.999.000,00	21	104.998.950,00	22	110.248.898,00	24	115.761.342,00	25	121.549.409,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				-		-		-		-		-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				66.673.000,00		70.006.650,00		73.506.983,00		77.182.332,00		81.041.448,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	66.673.000,00	2	70.006.650,00	2	73.506.983,00	2	77.182.332,00	2	81.041.448,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3.003.820.200,00		3.154.011.210,00		3.311.711.771,00		3.477.297.359,00		3.651.162.227,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	3.003.820.200,00	5	3.154.011.210,00	5	3.311.711.771,00	5	3.477.297.359,00	5	3.651.162.227,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05.2.01.0004 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1.530.000.000,00		1.606.500.000,00		1.686.825.000,00		1.771.166.250,00		1.859.724.563,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	5	1.530.000.000,00	5	1.606.500.000,00	5	1.686.825.000,00	5	1.771.166.250,00	5	1.859.724.563,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				85.402.100,00		89.672.205,00		94.155.815,00		98.863.606,00		103.806.786,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	85.402.100,00	1	89.672.205,00	1	94.155.815,00	1	98.863.606,00	1	103.806.786,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				-		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	0	-	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1.084.255.100,00		1.138.467.855,00		1.195.391.248,00		1.255.160.810,00		1.317.918.851,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	1.084.255.100,00	1	1.138.467.855,00	1	1.195.391.248,00	1	1.255.160.810,00	1	1.317.918.851,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01.0008 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				19.860.200,00		20.853.210,00		21.895.871,00		22.990.664,00		24.140.197,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	1	19.860.200,00	1	20.853.210,00	1	21.895.871,00	1	22.990.664,00	1	24.140.197,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				175.050.700,00		183.803.235,00		192.993.397,00		202.643.067,00		212.775.220,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	175.050.700,00	1	183.803.235,00	1	192.993.397,00	1	202.643.067,00	1	212.775.220,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				99.999.000,00		104.998.950,00		110.248.898,00		115.761.342,00		121.549.409,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	20	99.999.000,00	21	104.998.950,00	22	110.248.898,00	24	115.761.342,00	25	121.549.409,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
2.13.05.2.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				-		150.000.000,00		157.499.998,00		165.375.000,00		173.643.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0	-	21	150.000.000,00	22	157.499.998,00	24	165.375.000,00	25	173.643.750,00	1.06.2.08.2.13.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan dan Perlind. Anak, Pemberd. Masyarakat dan Pemerintah Desa	

Sumber: Dinsos, PPPAPMPD Kab. Mempawah

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan dan sandang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADA	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	

Sumber: Dinsos,PPPAPMPD Kab. Mempawah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing

memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.06.2.08.2.13.01.000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa									
2.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	55	57	59	61	63	65	
3.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	59,76	60,94	61,387	61,834	62,281	62,728	63,175	
4.	Indeks Desa	%	-	88	92	95	96	100	100	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	65	67	69	70	72	74	
6.	Persentase Cakupan Standar Pelayanan Minimal	%	-	10	25	38	52	68	84	
7.	Persentase LKD, LAD, dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang diberdayakan	%	-	19	22	22	23	24	24	
8.	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	%	-	43,5	49	53	53,7	60,65	64	
9.	Persentase Desa tertib administrasi serta terfasilitasi penataan desa	%	-	66	69	71	74	76	79	

Sumber: Dinsos,PPPAPMPD Kab. Mempawah

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.	Persentase pendamping sosial yang terfasilitasi		%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah Yang Dikelola		%	65	65	70	75	80	90	100	
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM		%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Positif	%	8,08	86,3	87,5	88,6	90,3	91,4	92,5	
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
7.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten		%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)		%	12,38	11,73	11,07	410,41	9,75	9,10	8,44	
9.	Persentase Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Positif	Kategori	601-700	601-700	601-700	601-700	601-700	601-700	601-700	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
11.	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	Positif	%	0,92	0,95	0,98	0,99	1,00	1,01	1,03	
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
12.	Persentase desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas (berkualitas: peraturan desa APBDes, peraturan desan RKPDDes, Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen RKPDDes dan APBDes, Ketaatan Pajak, Aset Desa)	positif	%	66	66	69	71	74	76	79	
13.	Persentase FAsilitasi Kerjasama Desa (Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama / Jumlah seluruh Desa)	positif	%	100	100	-	100	100	100	100	
14.	Jumlah Bumdesa dan Bumdesma yang berstatus Maju	positif	Bumdes	5	7	8	10	12	14	16	
15.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	positif	%	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Persentase peningkatan status desa mandiri		%	0	88	92	95	100	100	100	
17.	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa	positif	%	50	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Dinsos,PPPAPMPD Kab. Mempawah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

8. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2045 serta RPJMD periode berjalan.
9. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
10. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
11. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus

pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

12. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah 2025 – 2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.



Pemerintah
Kabupaten Mempawah